



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Akuntabilitas Sistem Online Hibah dan
Bantuan Sosial (SOHIB) Pemerintah Kota Bekasi
menggunakan Pendekatan *Multiple Accountability
Disorder***

Skripsi

Oleh

Indah Mutiarany

2016310107

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Akuntabilitas Sistem Online Hibah dan
Bantuan Sosial (SOHIB) Pemerintah Kota Bekasi
menggunakan Pendekatan *Multiple Accountability***

Disorder

Skripsi

Oleh

Indah Mutiarany

2016310107

Pembimbing

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Indah Mutiarany
Nomor Pokok : 2016310107
Judul : Analisis Akuntabilitas Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial (SOHIB) Pemerintah Kota Bekasi menggunakan Pendekatan *Multiple Accountability Disorder*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 2 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Hubertus Hasan, Drs., M.Si.

: 

Sekretaris

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

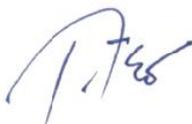
: 

Anggota

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Indah Mutiarany

NPM : 2016310107

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Akuntabilitas Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial (SOHIB) Pemerintah Kota Bekasi menggunakan Pendekatan *Multiple Accountability Disorder*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bekasi, 16 Juli 2021



Indah Mutiarany

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan rancangan penelitian yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bekasi menggunakan pendekatan *Multiple Accountability Disorder*”.

Penulisan skripsi ini merupakan karya tulis yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan yang penulis buat. Setiap saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar dapat membantu penulis membuat karya tulis ini menjadi lebih baik.

Pada prosesnya, penulis mendapat banyak dukungan, bantuan, bimbingan, masukan dari berbagai pihak yang sangat berperan dalam penyusunan karya tulis ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Diri sendiri yang sudah mau bertahan dan berjuang dengan segala situasi yang ada, yang selalu yakin kalau penulis bisa menyelesaikan ini dan menikmati semua prosesnya dengan penuh suka, duka, dan cita.
2. Keluarga, terutama bapak, mamah, dan adik-adik yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis dimanapun dan kapanpun.
3. Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan, juga sebagai dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan tetap sabar dalam membimbing penulis selama menyusun karya tulis ini.
4. Ibu Indraswari, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang memberikan materi dan pembelajaran kepada penulis.

6. Kepada Ibu Ida, Ibu Aning, Ibu Nitha dan Pak Biyan yang selalu meluangkan waktunya dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di BPKAD Kota Bekasi.
7. Ibu Yuli yang membantu penulis dalam mengurus surat perizinan di Kesbangpol Kota Bekasi.
8. Untuk Laras, Fadhlán, Destia, Shanty, Gofhar, Anisa, Davin, dan Adila yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam berbagai situasi selama di UNPAR.
9. Untuk Hellen, Xena, Yumna, Adit, dan Ulfa yang sudah mendukung penulis dan menyemangati penulis sejak SMA sampai sekarang.
10. Untuk Tim Hyebooboo, khususnya Arin dan Xena yang sudah menyemangati penulis selama pandemi dimulai sampai sekarang.
11. Untuk Brian yang selalu membantu, menyemangati dan meyakinkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
12. Untuk Sania, Ayudi, Gita, Liffia, Kak Andin, Resti, dan yang tidak bisa disebutkan, yang selalu memberikan semangat lewat daring.
13. Teman bimbingan Mas Sakti sejak seminar sampai dengan skripsi ini selesai.
14. Teman-teman angkatan 2016 serta lainnya di UNPAR, dan juga pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Pandemi yang memberikan warna lain dimasa perkuliahan penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap karya tulis ini bisa bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bekasi, 15 Juli 2021

Penulis,

Indah Mutiarany

ABSTRAK

Nama : Indah Mutiarany

NPM : 2016310107

Judul : Analisis Akuntabilitas Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial (SOHIB) Pemerintah Kota Bekasi menggunakan Pendekatan *Multiple Accountability Disorder*

Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial (SOHIB) Kota Bekasi merupakan sistem berbasis *website* yang digunakan untuk menjamin akuntabilitas penyaluran bantuan dana pemerintah. Meskipun demikian, mekanisme akuntabilitas pelayanan yang telah dilaksanakan melalui SOHIB terindikasi menemui berbagai tantangan. Berdasarkan indikasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tantangan akuntabilitas yang dialami oleh SOHIB Kota Bekasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Multiple Accountability Disorder* yang digagas oleh Jonathan Koppell mencakup lima dimensi akuntabilitas yaitu, *transparency, liability, controllability, responsibility* dan *responsiveness*. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif studi kasus. Data penelitian diperoleh dari pengumpulan dan studi dokumen pada situs web SOHIB serta peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan dana hibah dan bantuan sosial di lingkup Kota Bekasi, serta situs web SOHIB Kota Bekasi, wawancara mendalam oleh Analis Perencanaan Anggaran BPKAD Kota Bekasi,.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SOHIB masih menemui sejumlah tantangan akuntabilitas. Temuan tersebut terdiri dari: 1)Fitur deskripsi program pada proposal tidak tersedia; 2)SOHIB masih belum melakukan transparansi secara optimal; 3)Pertanggung jawaban pengguna dana hibah dan bansos hanya disampaikan kepada Pemerintah Kota Bekasi; 4)Prosedur pengajuan proposal hibah dan bantuan sosial masih berdasarkan aturan lama yaitu Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011; dan 5)Masyarakat belum ada yang memberikan masukan ataupun melapor mengenai SOHIB. Saran yang diberikan penulis yaitu: 1)Pengembangan situs web SOHIB secara optimal; 2)Pertanggung jawaban pelaksanaan program usulan disampaikan secara terbuka; 3)Pembaharuan prosedur berdasarkan peraturan yang berlaku; dan 4)Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SOHIB.

Kata Kunci: *Multiple Accountability Disorder*, Akuntabilitas, SOHIB Kota Bekasi, Hibah dan Bantuan Sosial.

ABSTRACT

Name : Indah Mutiarany

NPM : 2016310107

Title : *Accountability Analysis of Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial (SOHIB) Bekasi City Government with Multiple Accountability Disorder approach*

Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial (SOHIB) is a website-based system that is used to ensure accountability for the distribution of government funds. However, the service accountability mechanism that has been implemented through SOHIB is indicated to face various challenges. Based on these indications, this research is directed to find out the accountability challenges experienced by SOHIB Bekasi City.

This study uses the Multiple Accountability Disorder approach initiated by Jonathan Koppell which includes five dimensions of accountability, namely, transparency, liability, controllability, responsibility and responsiveness. The research method used in this study is a qualitative method. The research data was obtained from in-depth interviews by the Budget Planning Analyst in BPKAD, the collection and study of documents related to the implementation of grants and social assistance in the scope of the Bekasi City, as well as the Bekasi City SOHIB website.

Based on the results of research conducted by researchers, it can be concluded that the implementation of SOHIB still faces a number of accountability challenges. The findings consist of: 1)The program description feature in the proposal is not available; 2)SOHIB still has not carried out optimal transparency; 3)Accountability of users of grants and social assistance funds is only submitted to the Bekasi City Government; 4) the procedure for submitting proposals for grants and social assistance is still based on the old rules, namely Bekasi Mayor Regulation number 46 of 2011; and 5)The community has not yet provided input or reported on SOHIB. The suggestions given by the author are: 1)Optimal development of the SOHIB website; 2) Accountability for the implementation of the proposed program is delivered openly; 3)Renewal of procedures based on applicable regulations; and 4) Socialization to the community regarding SOHIB.

Keywords: Multiple Accountability Disorder, Accountability, Bekasi City SOHIB, Grants and Social Assistance.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	13
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian	13
1.5.1 Manfaat Teoritis	13
1.5.2 Manfaat Praktis	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Digitalisasi Pelayanan Publik	15
2.2 Akuntabilitas Sektor Publik	17
2.3 Dimensi Akuntabilitas	19
2.3.1 <i>Transparency</i>	19
2.3.2 <i>Liability</i>	20
2.3.3 <i>Controllability</i>	20
2.3.4 <i>Responsibility</i>	21
2.3.5 <i>Responsiveness</i>	22
2.4 <i>Multiple Accountability Disorder</i>	23
2.5 Kerangka Berpikir Analisis <i>Multiple Accountability Disorder</i> pada SOHIB Kota Bekasi	25
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Tipe Penelitian	26

3.2	Peran Peneliti	27
3.3	Lokasi Penelitian.....	28
3.4	Sumber Data.....	28
3.5	Prosedur Pengumpulan Data.....	30
3.5.1	Pengumpulan dan Studi Dokumen.....	30
3.5.2	Wawancara	30
3.6	Analisis Data.....	31
3.7	Pengecekan Keabsahan Data	33
3.8	Operasional Variabel	34
BAB IV		37
PROFIL PENELITIAN.....		37
4.1	Profil Program SOHIB Pemerintah Kota Bekasi.....	37
4.1.1	Tujuan SOHIB.....	39
4.1.2	Sasaran SOHIB	39
4.1.3	Pelaksana SOHIB	41
4.1.4	Jenis Bantuan Program SOHIB.....	41
4.1.5	Tahapan Program SOHIB	42
4.2	Profil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi	49
4.2.1	Peran BPKAD terhadap SOHIB	51
BAB V.....		53
ANALISIS PEMBAHASAN		53
5.1	Analisis Tantangan Akuntabilitas	53
5.1.1	Transparency	53
5.1.2	<i>Liability</i>	62
5.1.3	<i>Controllability</i>	64
5.1.4	<i>Responsibility</i>	66
5.1.5	<i>Responsiveness</i>	69
5.2	<i>Multiple Accountability Disorder</i>	72
BAB VI.....		76
KESIMPULAN DAN SARAN.....		76
6.1.	Kesimpulan	76

6.2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	83
Lampiran I :Kartu Bimbingan	83
Lampiran II : Pertanyaan Wawancara.....	85
Lampiran III : Surat Penelitian.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Proposal yang terdata pada website SOHIB	4
Tabel 1. 2 Jumlah proposal masuk berdasarkan SKPD di Kota Bekasi.....	5
Tabel 2. 1 Konsepsi Akuntabilitas Jonathan Koppel	25
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	34
Tabel 5. 1 Lima dimensi akuntabilitas Jonathan Koppel pada program SOHIB Kota Bekasi	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan Beranda Website SOHIB	38
Gambar 4.2 Tahapan Pengajuan Proposal pada Website SOHIB	42
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BPKAD Kota Bekasi	50
Gambar 5.4 Laman Beranda situs web SOHIB	55
Gambar 5.5 Isi laman “Tentang” pada situs web SOHIB Kota Bekasi	56
Gambar 5.6 Isi laman “Tentang” pada situs web SOHIB Kota Bekasi	57
Gambar 5.7 Laman "Proposal" pada situs web SOHIB Kota Bekasi	58
Gambar 5.8 Laman "Proposal" pada situs web SOHIB Kota Bekasi	58
Gambar 5.9 Tampilan Profil Proposal Pengusul Dana Hibah dan Bantuan Sosial	59
Gambar 5.10 Tampilan Profil Proposal Pengusul Dana Hibah dan Bantuan Sosial	60
Gambar 5.11 Tampilan Laman "Peraturan" pada situs web SOHIB Kota Bekasi	69
Gambar 5.12 Tampilan Laman "Lapor" pada situs web SOHIB Kota Bekasi	70

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DNC-PBBS	: Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial
DNC-PBH	: Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah
KUA	: Kebijakan Umum APBD
MAD	: <i>Multiple Accountability Disorder</i>
NPHD	: Naskah Perjanjian Hibah Daerah
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA-PPKD	: Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
RKA-SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOHIB	: Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TU Sedta	: Tata Usaha Sekretaris Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keterbukaan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dapat memberikan informasi mengenai proses penggunaan sumber daya pada pelaksanaan pelayanan publik tersebut. Salah satu bentuk keterbukaan dalam pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bekasi dalam memberikan dana hibah dan bantuan sosial yaitu Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial Kota Bekasi atau SOHIB.

SOHIB merupakan sistem berbentuk situs web yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi keterbukaan dalam memberikan informasi serta mempertanggung jawabkan jalannya penggunaan dana bantuan untuk membiayai proyek sosial yang diinginkan masyarakat. Sesuai dengan tujuannya dalam mendukung keterbukaan, melalui situs ini diharapkan masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengetahui tahapan pengajuan proposal SOHIB, informasi umum mengenai SOHIB, informasi setiap proposal yang diajukan para pemohon bantuan, peraturan yang mengatur pelaksanaan SOHIB, serta memberikan masukan dan saran.

Pada SOHIB, tahapan pengajuan proposal dijabarkan secara ringkas yang terdiri atas pendaftaran hibah dan bantuan sosial, proses seleksi, hibah dan bantuan sosial disetujui, hibah dan bantuan sosial berjalan, mengirimkan

laporan, dan berakhir pada proses verifikasi. Akan tetapi, tahapan proposal ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut dan berbeda dengan tahapan SOHIB yang tertera pada menu “Tentang SOHIB” pada *website*. Dijelaskan pada menu tersebut, tahapan SOHIB terdiri dari:¹

1. Masyarakat yang ingin mengajukan proposal bantuan hibah dan bantuan sosial mendaftarkan melalui aplikasi dan mengirimkan kelengkapan dokumen secara langsung kepada Pemerintah Kota Bekasi.
2. Tata Usaha Sekretaris Daerah (TU Setda) melakukan verifikasi kelengkapan proposal dan dokumen pendukung dan melakukan *input data* melalui *website sohib.bekasikota.go.id*.
3. Wali Kota memberikan disposisi kepada TU Setda untuk dicatat dan disampaikan kepada Tim Pertimbangan.
4. Tim Pertimbangan mendistribusikan proposal kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai bidangnya.
5. SKPD melakukan evaluasi keabsahan permohonan belanja hibah dan bantuan sosial dibantu oleh camat dan lurah.
6. Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas permohonan belanja hibah dan bantuan sosial.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah yang

¹ Website SOHIB Kota Bekasi, *Tentang SOHIB*, diakses melalui <https://sohib.bekasikota.go.id/pages/tentang>

dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah (DNC-PBH) dan Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial (DNC-PBBS).

8. Wali Kota menetapkan persetujuan yang dituang dalam Lembar Persetujuan Wali Kota dan menjadi dasar pencantuman alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Namun, tahapan SOHIB yang disebutkan diatas juga mengalami perbedaan berdasarkan perubahan aturan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kota Bekasi. Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011 merupakan peraturan awal yang menjadi landasan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. Namun pada prosesnya, peraturan ini berubah sebanyak tujuh kali dan membuat beberapa tahapan permohonan dana hibah dan bantuan sosial juga berubah. Salah satu perubahan tersebut yaitu dihapuskannya Tim Pertimbangan pada tahapan pengajuan proposal hibah dan bantuan sosial.²

Informasi umum yang terdapat pada menu “Tentang SOHIB” berisikan mengenai maksud dan tujuan SOHIB, serta tahapan pengajuan proposal bantuan dana hibah dan bantuan sosial. Pada situs ini, tertulis bahwa melalui SOHIB masyarakat akan mendapatkan dua hal yaitu:

² Hasil wawancara dengan Ibu Nitha Rosmala selaku Analis Perencanaan Anggaran BPKAD Kota Bekasi, pada 13 Januari 2021.

1. Dapat mengirimkan proposal hibah dan bantuan sosial hingga mengawasi status tahapan yang sedang dilalui proposal tersebut;
2. Berpartisipasi dalam mengawasi jalannya hibah dan bantuan sosial yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Bekasi, sehingga dapat turut serta memberikan masukan terhadap jalannya hibah dan bantuan sosial tersebut.

Setiap proposal yang diusulkan kepada Pemerintah Kota Bekasi akan terdata pada situs web SOHIB. Proposal yang berhasil terdata dalam SOHIB akan dikategorikan berdasarkan tahun anggaran dan SKPD yang menjadi pemberi dana hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan data pada laman SOHIB selama 4 tahun terakhir, sebanyak 8.890 masuk pada tahun anggaran 2018, 2019, 2020, dan 2021.

Tabel 1. 1 Proposal yang terdata pada website SOHIB

Tahun	Jumlah Usulan Proposal
2018	576 proposal
2019	3.473 proposal
2020	4.582 proposal
2021	380 proposal

Sumber: Website SOHIB per tanggal 1 Januari 2021

Sedangkan untuk SKPD, ada 18 SKPD yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan bantuan dana hibah dan bantuan sosial. Penunjukkan SKPD untuk menjadi pengelola bantuan hibah berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Tabel 1. 2 Jumlah proposal masuk berdasarkan SKPD di Kota Bekasi

SKPD	2018	2019	2020	2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	21	17	18	18
Bagian Bina Kesejahteraan Sosial	227	76	68	65
Bagian Tata Pemerintahan	159	-	-	-
Bagian Tata Pemerintahan Setda	-	3	-	-
Bagian Bina Pemerintahan	159	-	6	65
Dinas Bangunan dan Pemukiman	32	-	-	-
Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora)	13	3	8	7
Dinas Kesehatan	-	-	1	-
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	4	2	2
Dinas Lingkungan Hidup	-	1	-	3
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	-	2	2
Dinas Pendidikan	104	3.349	4.460	59
Dinas Perhubungan	-	-	1	-
Dinas Perumahan	-	-	-	-
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Peternakan	-	6	5	13
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	2	-	-	-
Dinas Pertanian dan Perikanan	2	-	-	-
Dinas Sosial	16	14	11	4

Sumber: Website SOHIB Kota Bekasi per tanggal 1 Januari 2021

Setiap proposal yang terdata akan menampilkan detail proposal yang terdiri dari nama organisasi pengusul bantuan, alamat organisasi, SKPD pengelola, tahun anggaran, tahapan proposal yang sedang dilalui, jumlah anggran yang diajukan, dan jumlah anggaran yang disetujui. Namun, detail proposal tersebut hanya berisikan informasi dasar dan tidak mencantumkan maksud dan tujuan dari proposal yang diusulkan oleh para pemohon bantuan.

Untuk tahapan proposal yang ditampilkan terdiri dari empat tahap yaitu, proposal masuk, disposisi kepala daerah, rekomendasi disetujui, dan berakhir

pada disetujui TAPD. Pada tahapan proposal akan ditampilkan tanggal dan status dari masing-masing tahapan:

1. Proposal diterima. Proposal tersebut telah diterima dan sedang dalam proses disposisi pimpinan.
2. Disposisi kepala daerah. Proposal tersebut telah didisposisi dan diedarkan kepada SKPD terkait yang dipilih oleh Wali Kota untuk dilakukan verifikasi dan rekomendasi.
3. Rekomendasi disetujui. Pengelola dana hibah bantuan telah melakukan cek lokasi dan telah memberikan rekomendasi. Pada tahap ini rekomendasi yang diberikan bisa “disetujui” ataupun “tidak disetujui”. Jika rekomendasi tidak disetujui, maka proposal tersebut tidak bisa masuk ke tahap terakhir.
4. Disetujui TAPD. Penerima bantuan akan menerima dana bantuan sebesar jumlah yang disetujui pada tahun anggaran yang ditentukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Fitur yang terdapat pada SOHIB juga mengalami disfungsi yang membuat informasi menjadi tidak dapat tersampaikan. Seperti pada menu “Peraturan” dan “Lapor” yang tidak dapat diakses sama sekali. Fitur peraturan seharusnya dapat memberikan informasi mengenai peraturan apa saja yang berkaitan dengan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial, sedangkan fitur lapor bisa menjadi media bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kota Bekasi terhadap pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.

SOHIB sebagai sistem yang membantu pelaksanaan hibah dan bantuan sosial secara online dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seiring berjalannya waktu, aturan ini mengalami tujuh kali perubahan dan masih menjadi aturan yang digunakan dalam pelaksanaan SOHIB. Peraturan Wali Kota nomor 46 tahun 2011 ini mengatur tentang prosedur pengajuan bantuan dana hibah dan bantuan sosial, pelaksanaan dan penatausahaan bantuan dana, pertanggung jawaban dan pelaporan penggunaan dana yang telah diberikan, serta bagaimana pengawasan dan evaluasi penggunaan dana pemerintah dalam pemberian dana hibah dan bantuan sosial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, SOHIB merupakan situs web yang membantu Pemerintah Kota Bekasi agar lebih akuntabel karena memiliki tujuan untuk mempertanggungjawabkan dana hibah dan bantuan sosial secara terbuka. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntabilitas memiliki definisi perihal bertanggung jawaban; keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban.³ Melihat definisi tersebut, keterbukaan pada SOHIB selaras dengan konsep akuntabilitas.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, *Akuntabilitas*, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas>

Ditengah tuntutan akuntabilitas yang terus meningkat, penggunaan media daring menjadi salah satu cara untuk memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik. Beberapa tahun kebelakang, digitalisasi pelayanan publik terus disosialisasikan seiring dengan adopsi digital yang terus meningkat. Situasi ini juga didukung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yang tidak bisa lepas dari teknologi.

Dikarenakan definisi akutabilitas yang begitu luas, sering membuat satu organisasi terlihat tidak akuntabel. Menurut Duffy, akuntabilitas mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang⁴. Duffy juga menjelaskan bahwa:⁵

Most public managers think of accountability in terms of holding an individual or department responsible for program success and failure. However, accountability is much more than serving out rewards and punishment, though this feature is an essential element.

Luasnya persepsi akuntabilitas tersebut membuat Jonathan Koppel mengelompokkan akutabilitas kedalam lima dimensi yang berbeda yaitu, *transparency* (transparansi), *liability* (pertanggung jawaban), *controllability* (pengendalian), *responsibility* (tanggung jawab), dan *responsiveness* (responsivitas). Dari kelima dimensi tersebut, konsep akuntabilitas ini juga masih sangat luas karena masing-masing dari berbagai elemen membutuhkan

⁴ PATIMES, 4 Februari 2019, John Duffy, *Accountability: The Foundation of Trust in Public Administration*, Diakses melalui <https://patimes.org/accountability-the-foundation-of-trust-in-public-administration/> pada 20 Mei 2021.

⁵ Ibid.

operasionalisasi yang luas, serta setiap elemen tidak dapat diukur menggunakan skala yang sama.⁶

Melihat dari pendapat diatas, organisasi tidak bisa hanya bertanggung jawab dengan salah satu pihak yang terlibat dalam suatu program, melainkan harus bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang turut andil dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, suatu organisasi juga tidak dapat menjadi akuntabel dalam berbagai aspek karena adanya batasan tertentu. Hal inilah yang memunculkan adanya akuntabilitas ganda atau *Multiple Accountability*.

Multiple Accountability atau akuntabilitas ganda adalah akuntabilitas yang memuaskan berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Namun dalam pelaksanaannya, akuntabilitas tidak bisa memuaskan seluruh pihak yang bekepentingan di dalamnya, sehingga memunculkan konflik ekspetasi dalam organisasi yang menyebabkan organisasi kesulitan untuk menggabungkan ekspetasi yang berbeda tersebut untuk diprioritaskan. Hal inilah yang memunculkan *Multiple Accountability Disorder (MAD)* atau tantangan akuntabilitas ganda.

Koppel menjelaskan, tantangan akuntabilitas ganda muncul sebagai dilema dalam akuntabilitas karena adanya keinginan sebuah organisasi untuk selalu akuntabel diberbagai aspek serta memuaskan para pihak yang

⁶ Mark Bovens, *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework*, European Law Journal, Vol. 13, No.4, Juli 2007, hlm. 450.

berkepentingan. Untuk melihat adanya MAD, Koppell merumuskan tantangan akuntabilitas menggunakan lima dimensi akuntabilitasnya.

Meskipun memiliki tujuan untuk memfasilitasi keterbukaan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat terhadap jalannya hibah dan bantuan sosial, SOHIB Kota Bekasi nyatanya belum dilakukan secara optimal, sehingga ditemukan indikasi masalah sebagai berikut:

1. *Fitur deskripsi program pada proposal tidak tersedia.*

Permasalahan ini berkaitan dengan salah satu dimensi akuntabilitas Koppel yaitu *Transparency*. *Transparency* yang dimaksud disini adalah bagaimana situs SOHIB memberikan informasi yang masih kurang lengkap dengan beberapa fitur tidak dapat digunakan. Informasi yang disampaikan hanya informasi umum, tidak menyampaikan maksud dan tujuan program usulan tersebut diajukan. Transparansi juga berkaitan dengan penyampaian pertanggung jawaban para penerima dana hibah dan bantuan sosial. Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban secara terbuka yang diusung oleh SOHIB sebagai tujuan adanya situs web tersebut.

2. *Peraturan dan prosedur SOHIB mengalami kesenjangan.*

Selama pelaksanaan SOHIB, aturan yang prosedur pelaksanaan SOHIB yang ditampilkan dalam *website* masih menggunakan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adanya perbedaan antara prosedur yang ditampilkan di *website* dengan peraturan yang saat ini berlaku membuat beberapa prosedur pengajuan proposal SOHIB mengalami perubahan. Perubahan prosedur ini jika diperbaharui justru akan memberikan informasi baru bagi para pengguna layanan SOHIB. Permasalahan ditemukan celah-celah tertentu yang berkaitan dengan lima aspek akuntabilitas Koppel.

Transparansi berkaitan dengan penyampaian informasi yang masih belum lengkap mengenai hibah dan bantuan sosial. Aspek *Liability* berkaitan dengan konsekuensi kinerja yang diterima selama proses pemberian dana hibah dan bantuan sosial, baik bagi para penerima ataupun pemberi dana hibah dan bantuan sosial. *Controllability* berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam pemberian dana hibah dan bantuan. Dalam pelaksanaannya, ada pihak yang sudah tidak lagi memiliki tugas, namun tidak ditemukan keselarasan antara aturan terbaru dan proses yang ditampilkan pada situs web. *Responsibility* berkaitan dengan aturan yang mengatur pelaksanaan hibah dan bantuan sosial. Dalam hal ini, aturan tersebut tidak disebutkan pada situs web SOHIB. *Responsiveness* berkaitan dengan target capaian dan daya tanggap organisasi dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.

Berdasarkan indikasi masalah dan relevansi aspek-aspek pada model yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini kemudian diarahkan untuk mengetahui tantangan akuntabilitas serta *Multiple Accountability Disorder* pada SOHIB Kota Bekasi. Pada SOHIB Kota Bekasi terdapat indikasi bahwa Pemerintah Kota Bekasi belum menerapkan mekanisme akuntabilitas secara tepat jika melihat dari maksud dan tujuan yang dituliskan pada SOHIB. Terlebih, program ini sudah diterapkan dengan sistem daring yang seharusnya dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana hibah dan bantuan sosial. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian mengenai akuntabilitas menggunakan pendekatan *Multiple Accountability Disorder* yang dirumuskan oleh Jonathan Koppell.

Melalui latar belakang yang telah sampaikan, peneliti akan meneliti tentang akuntabilitas program Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bekasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti menemukan bahwa fitur yang terdapat dalam situs web SOHIB masih belum memunculkan akuntabilitas secara lengkap. Terdapat fitur SOHIB yang mengalami disfungsi karena fitur tersebut tidak dapat diakses. Selain itu, prosedur yang dipaparkan pada situs web juga masih belum selaras dengan perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 46 tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban

dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka muncul pertanyaan penelitian yaitu:

“Bagaimanakah akuntabilitas pada SOHIB Kota Bekasi berdasarkan pendekatan *Multiple Aaccountability Disorder*?”

1.4 Tujuan Penelitian

“Mengetahui bentuk dan tantangan akuntabilitas yang dialami SOHIB Kota Bekasi sebagai sebuah sistem.”

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi para akademisi terkait dengan akuntabilitas program yang menggunakan dana hibah dan bantuan sosial.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen pendukung dalam mengevaluasi akuntabilitas program SOHIB, serta membantu memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam pengembangan pelaksanaan program SOHIB Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Berdasarkan tujuannya, sistematika penulisan dibuat untuk mendapatkan gambaran serta pembahasan dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan secara garis besar mengenai penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN. Menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang adanya tantangan akuntabilitas ganda (*Multiple Accountability Disorder*) pada akuntabilitas situs SOHIB.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Berisikan penjelasan mengenai lima dimensi akuntabilitas yang dapat membantu peneliti menemukan tantangan akuntabilitas pada SOHIB sebagai media layanan publik yang bersifat digital.

BAB III: METODE PENELITIAN. Menjelaskan metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: PROFIL PENELITIAN. Menguraikan profil Program SOHIB Pemerintah Kota Bekasi dan BPKAD Kota Bekasi.

BAB V: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Menjabarkan hasil temuan di lapangan mengenai akuntabilitas Sistem Online Hibah dan Bantuan Sosial (SOHIB).

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN. Menjabarkan kesimpulan serta saran atas hasil temuan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA. Berisikan data-data dan peraturan yang digunakan sebagai sumber bagi peneliti selama melakukan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Digitalisasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai pemberian layanan baik dalam bentuk barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh penyedia pelayanan publik. Siagian menyebutkan pelayanan publik merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memberikan jasa beserta kemudahan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan:⁷

- a. Pelayanan publik berhubungan dengan kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan haknya,
- b. Pelayanan yang diberikan berupa barang dan jasa yang vital, Adanya prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan penghematan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman, segala aktivitas manusia semakin bergantung dengan teknologi. Kemajuan teknologi inipun tidak hanya memengaruhi sektor perdagangan atau komunikasi saja, namun juga merambah pada sektor pemerintahan. Perkembangan inipun juga mempengaruhi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar lebih mudah dan efisien, dan dapat diakses oleh siapapun. Untuk itu

⁷ Siagian, *Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW)* oleh Rizky Hersya Pratama, Abdul Hakim, Muhammad Shobaruddin, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 12.